

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas

dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat (Sadjijono, 2006).

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari dua dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kermanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu (Djamin, 2014) :

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi

yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
 - 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Pengertian Pama

Perwira Pertama (Pama) adalah jenjang kepangkatan awal dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang meliputi Inspektur Polisi Dua (Ipda), Inspektur Polisi Satu (Iptu), dan Ajun Komisaris Polisi (AKP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian

Republik Indonesia Indonesia No. 3 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependidikan Anggota Polri serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pama merupakan perwira pelaksana yang memiliki tugas memimpin unit kerja tertentu, melaksanakan pengawasan terhadap anggota, serta menjalankan kebijakan pimpinan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Perwira Pertama (Pama) merupakan jabatan kepolisian golongan perwira yang menempati jenjang awal dalam struktur kepemimpinan perwira di institusi kepolisian (Mulyadi, 2015). Menurut Sutanto (2015), Pama adalah perwira yang berada pada level operasional dan berperan langsung dalam pelaksanaan tugas kepolisian, sehingga dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi organisasi. Sementara itu, Siagian (2012) menyatakan bahwa perwira pada tingkat awal merupakan unsur pimpinan yang berperan penting dalam menjembatani kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan teknis di lapangan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perwira Pertama (Pama) adalah anggota Polri pada jenjang kependidikan awal perwira yang berperan sebagai pelaksana dan pimpinan unit kerja di tingkat operasional, dengan tanggung jawab mengoordinasikan anggota serta menjalankan tugas kepolisian sesuai kewenangan yang dimilikinya.

4. Tugas Pama

Tugas utama Pama adalah melaksanakan pengambilan keputusan operasional di lapangan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan kepolisian berjalan sesuai prosedur dan sasaran organisasi (Suharto, 2017). Pama harus mampu mengatur personel, sumber daya, dan strategi pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien. Selain itu, Pama juga berperan dalam mengawasi bawahan agar setiap anggota mematuhi aturan dan melaksanakan perintah dengan benar (Riyanto, 2016). Pengawasan ini mencakup pembinaan disiplin, evaluasi kinerja, dan memberikan arahan atau koreksi jika diperlukan.

Pama juga memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan kepatuhan terhadap aturan organisasi dengan fleksibilitas tindakan di lapangan, terutama ketika menghadapi situasi yang kompleks atau tidak terduga. Dalam menjalankan tugasnya, Pama harus mengantisipasi risiko, mengelola konflik, dan memastikan keselamatan anggota serta masyarakat yang dilayani. Hal ini menekankan bahwa tugas Pama tidak hanya administratif, tetapi juga operasional dan strategis dalam konteks kepolisian (Suharto, 2017 ; Riyanto, 2016).

Selain itu, Pama bertanggung jawab dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan operasional kepada atasan langsung (Haryanto, 2019). Laporan yang disusun mencakup hasil pelaksanaan tugas, kendala yang dihadapi, dan rekomendasi perbaikan agar kinerja satuan kerja dapat meningkat. Pama juga berperan dalam memastikan bahwa setiap prosedur pelaksanaan tugas dijalankan secara tepat, sehingga kesalahan atau risiko dapat diminimalkan.

Fungsi evaluasi ini menuntut Pama untuk memiliki keterampilan analisis data dan kemampuan menilai situasi secara objektif. Pama harus mampu mengidentifikasi masalah sebelum berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mengambil tindakan korektif yang tepat. Dengan demikian, peran Pama dalam evaluasi operasional berfungsi sebagai kontrol kualitas dalam kinerja kepolisian.

Selain pengawasan dan pelaporan, Pama juga memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kurniawan, 2020). Pama harus memastikan pengendalian massa, pengawasan wilayah, serta tindakan preventif maupun represif dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Tugas ini menuntut kemampuan manajemen situasi, koordinasi tim, dan pengambilan keputusan cepat yang tepat. Pama juga harus memperhitungkan dampak sosial dan hukum dari setiap tindakan yang diambil, sehingga risiko bagi masyarakat dapat diminimalkan. Dengan demikian, Pama berperan sebagai pengambil keputusan yang bertanggung jawab, pengawas bawahan, dan pelaksana tugas keamanan masyarakat secara efektif. Tugas dan tanggung jawab yang kompleks ini menekankan pentingnya peran Pama dalam menjaga kelancaran operasional kepolisian, disiplin anggota, serta keamanan dan ketertiban masyarakat (Kurniawan, 2020; Simon, 1976).

B. Pengambilan Keputusan

1. Pengertian Pengambilan Keputusan

Menurut Simon (1960), pengambilan keputusan (*decision making*) adalah proses memilih satu alternatif tindakan dari beberapa alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Simon (1960) memandang pengambilan keputusan sebagai inti dari perilaku administratif dan manajerial. Pengambilan keputusan tidak sepenuhnya bersifat rasional karena manusia memiliki keterbatasan dalam kemampuan berpikir, informasi, dan waktu yang kemudian melahirkan konsep “*bounded rationality*” (rasionalitas terbatas) (Augier & March, 2004).

Menurut Kahneman dan Tversky (1979) dalam *Prospect Theory*, pengambilan keputusan merupakan proses kognitif yang berlangsung dalam kondisi risiko dan ketidakpastian, di mana individu tidak selalu bertindak rasional. Individu mengevaluasi hasil keputusan berdasarkan perubahan relatif terhadap titik acuan (*reference point*), bukan berdasarkan nilai akhir. Selain itu, individu cenderung lebih sensitif terhadap kerugian dibandingkan keuntungan yang setara (*loss aversion*), serta menunjukkan penyimpangan rasionalitas akibat efek pembingkaihan (*framing effect*) dan pembobotan subjektif terhadap probabilitas (*probability weighting*) (Kahneman, 2003).

Pengambilan keputusan merupakan proses kognitif yang melibatkan pemilihan di antara dua atau lebih alternatif tindakan berdasarkan penilaian terhadap informasi, preferensi, dan tujuan individu. Pengambilan keputusan

adalah aktivitas kognitif adaptif yang dipengaruhi oleh keterbatasan informasi dan tujuan pengambil keputusan (Ranyard, 1998).

Long, et all., (2023) menyatakan bahwa keputusan keberlanjutan sebagian dijelaskan oleh perbedaan persepsi risiko terhadap dampak lingkungan; orang dengan *risk perception* tinggi lebih mungkin memilih opsi yang mengurangi risiko lingkungan meskipun biaya awal lebih tinggi. Implikasi: kebijakan pro-lingkungan perlu menargetkan peningkatan *risk perception* terkait dampak nyata. Faktor psikologis seperti bias kognitif (terlalu percaya diri, keengganan terhadap kerugian, perilaku berkelompok) memainkan peran krusial dalam membentuk pengambilan keputusan (Himadeep, et all., 2025).

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan pengambilan keputusan adalah proses rasional dan sistematis untuk memilih alternatif tindakan terbaik berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, namun proses tersebut selalu berada dalam batas kemampuan kognitif dan informasi manusia (*bounded rationality*).

2. Tahap Pengambilan Keputusan

Menurut Simon (1960), proses pengambilan keputusan terdiri dari tiga tahap utama, yaitu:

a. *Intelligence Phase* (Tahap Intelijen)

Mengidentifikasi dan memahami masalah dengan mengumpulkan informasi yang relevan.

b. *Design Phase* (Tahap Perancangan)

Mengembangkan dan menganalisis berbagai alternatif solusi yang mungkin diambil.

c. *Choice Phase* (Tahap Pemilihan)

Memilih alternatif yang dianggap paling sesuai untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Proses pengambilan keputusan terdiri dari beberapa tahap kognitif yang menggambarkan bagaimana individu memproses informasi hingga menentukan pilihan. Mereka menjelaskan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses yang dinamis dan bertahap, bukan sekadar tindakan memilih satu alternatif. Berikut adalah tahap-tahap pengambilan keputusan (Ranyard, et al., 1997) :

1) Identifikasi Masalah (*Problem Identification*)

Individu menyadari adanya perbedaan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan. Tahap ini melibatkan kesadaran terhadap masalah dan kebutuhan untuk bertindak.

2) Pengumpulan dan Pemrosesan Informasi (*Information Search and Processing*)

Individu mencari, mengumpulkan, serta menilai informasi yang relevan untuk memahami situasi dan alternatif yang tersedia. Proses ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas kognitif dan pengalaman individu.

3) Evaluasi Alternatif (*Evaluation of Alternatives*)

Setiap alternatif dianalisis berdasarkan kriteria tertentu seperti risiko, manfaat, nilai pribadi, atau tujuan yang ingin dicapai. Pada tahap ini sering muncul bias kognitif dan pengaruh emosional.

4) Pemilihan Alternatif (*Choice Selection*)

Individu memilih alternatif yang dianggap paling sesuai atau “paling memuaskan” berdasarkan hasil evaluasi. Pemilihan ini tidak selalu rasional karena dapat dipengaruhi oleh intuisi atau persepsi risiko.

5) Implementasi Keputusan (*Decision Implementation*)

Keputusan yang telah diambil diterapkan ke dalam tindakan nyata. Tahap ini memerlukan komitmen dan kesiapan untuk melaksanakan pilihan yang diambil.

6) Evaluasi Hasil (*Outcome Evaluation*)

Setelah keputusan dijalankan, individu menilai hasilnya apakah sesuai dengan tujuan atau perlu dilakukan penyesuaian. Evaluasi ini juga menjadi dasar pembelajaran untuk pengambilan keputusan di masa depan.

3. Aspek-Aspek Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh berbagai indikator psikologis dan situasional yang menentukan bagaimana seseorang menilai pilihan dan bertindak. Ranyard, et all., (1997): menjelaskan bahwa keputusan manusia tidak hanya berdasarkan logika rasional, tetapi juga melibatkan konteks, preferensi pribadi, emosi, keyakinan, dan tindakan nyata. Berikut penjelasan lima indikator pengambilan keputusan (Ranyard, et all., 1997):

a. Keadaan (*Circumstances*)

Keadaan merujuk pada situasi atau konteks eksternal yang melingkupi individu saat membuat keputusan. Keadaan termasuk faktor lingkungan, sosial, ekonomi, organisasi, maupun tekanan waktu. Keadaan ini dapat memengaruhi ketersediaan informasi, tingkat risiko, serta peluang yang dapat dipertimbangkan. Contoh: keputusan seseorang bisa berbeda jika diambil dalam kondisi mendesak dibandingkan dalam kondisi tenang dan terkendali.

b. Preferensi (*Preferences*)

Preferensi (*Preferences*) menggambarkan nilai, tujuan, dan prioritas pribadi yang menjadi dasar dalam memilih alternatif. Setiap individu memiliki preferensi berbeda dalam menilai apa yang dianggap “baik” atau “bermanfaat”. Preferensi membantu individu menyusun urutan kepentingan (*value hierarchy*) dalam memilih tindakan. Contoh: seseorang yang lebih menghargai keamanan daripada keuntungan akan memilih opsi dengan risiko rendah.

c. Emosi (*Emotions*)

Emosi memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang menilai risiko dan membuat keputusan. Perasaan seperti takut, cemas, senang, atau percaya diri dapat memperkuat atau melemahkan penilaian rasional. Contoh: rasa takut bisa membuat seseorang menolak peluang berisiko, meskipun peluang keuntungannya tinggi.

d. Tindakan (*Action*)

Tindakan (*Action*) Merupakan eksekusi nyata dari keputusan yang telah diambil. Menunjukkan sejauh mana seseorang menerjemahkan pilihan ke dalam perilaku konkret. Aspek ini juga mencakup komitmen, konsistensi, dan tanggung jawab terhadap hasil keputusan. Contoh: memilih jurusan kuliah tertentu harus diikuti dengan tindakan mendaftar dan mengikuti proses belajar.

e. Hipotesis Individu (*Beliefs*)

Hipotesis Individu (*Beliefs*) mengacu pada keyakinan, asumsi, atau pandangan subjektif seseorang tentang dunia atau situasi yang dihadapi. Keyakinan ini memengaruhi cara individu mempersepsikan informasi, risiko, dan hasil keputusan. Hipotesis Individu (*Beliefs*) dapat terbentuk dari pengalaman pribadi, budaya, pendidikan, atau sumber informasi yang dipercaya. Contoh: seseorang yang percaya bahwa “usaha keras selalu membuahkan hasil” akan lebih berani mengambil keputusan berisiko tinggi.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Menurut Simon (1960), proses pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang membatasi kemampuan manusia untuk berpikir dan bertindak secara sepenuhnya rasional. Faktor-faktor ini melahirkan konsep yang terkenal yaitu “*bounded rationality*” (rasionalitas terbatas), yang menjelaskan bahwa manusia mengambil keputusan dalam batas-batas kemampuan kognitif, waktu, dan informasi yang dimilikinya.

Menurut Simon (1960), pengambilan keputusan tidak berlangsung dalam kondisi rasionalitas sempurna. Keputusan dipengaruhi oleh berbagai keterbatasan yang melekat pada individu maupun lingkungan organisasi. Faktor-faktor utama tersebut antara lain:

a. *Bounded Rationality* (Rasionalitas Terbatas)

Konsep *bounded rationality* merupakan inti pemikiran Simon dalam teori pengambilan keputusan. Simon menjelaskan bahwa individu memiliki keterbatasan dalam kapasitas kognitif untuk memproses informasi, sehingga tidak mampu mengevaluasi seluruh alternatif dan konsekuensinya secara optimal. Akibatnya, pengambilan keputusan lebih bersifat terbatas dan realistis dibandingkan rasionalitas normatif (Simon, 1976).

b. Keterbatasan Informasi

Pengambil keputusan jarang memiliki informasi yang lengkap dan sempurna. Informasi yang tersedia sering kali bersifat tidak lengkap, tidak pasti, atau ambigu. Kondisi ini membatasi kemampuan individu dalam memprediksi hasil dari setiap alternatif keputusan dan memperkuat terjadinya *bounded rationality* (Simon, 1960).

c. Keterbatasan Waktu

Tekanan waktu merupakan faktor penting yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam situasi nyata, keputusan sering harus diambil dengan cepat sehingga individu tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan analisis mendalam terhadap semua alternatif yang ada (Simon, 1960).

d. Kapasitas Kognitif Individu

Kapasitas memori, kemampuan berpikir logis, serta kemampuan mengolah informasi menjadi batasan alami dalam pengambilan keputusan. Simon menegaskan bahwa manusia bukanlah *maximizers*, melainkan *satisficers*, yaitu individu yang memilih alternatif yang dianggap cukup memuaskan, bukan yang paling optimal (Simon, 1976).

e. Nilai, Tujuan, dan Preferensi

Keputusan juga dipengaruhi oleh sistem nilai, tujuan pribadi, serta preferensi individu. Faktor-faktor subjektif ini memengaruhi cara individu menilai informasi dan menentukan alternatif yang dianggap layak untuk dipilih (Simon, 1960).

f. Konteks dan Struktur Organisasi

Dalam konteks organisasi, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh aturan, prosedur, struktur hierarki, serta budaya organisasi. Struktur ini dapat membatasi atau mengarahkan pilihan yang tersedia bagi pengambil keputusan (Simon, 1976).

Lebih lanjut, menurut Kahneman dan Tversky (1979), pengambilan keputusan dipengaruhi oleh persepsi risiko (*risk perception*), titik acuan (*reference point*), kecenderungan menghindari kerugian (*loss aversion*), efek pembingkaihan (*framing effect*), serta pembobotan subjektif terhadap probabilitas (*probability weighting*). Faktor-faktor tersebut menyebabkan individu sering kali menyimpang dari rasionalitas murni dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian.

C. *Bounded Rationality*

1. Pengertian *Bounded Rationality*

Bounded Rationality merupakan konsep bahwa pengambilan keputusan manusia tidak pernah sepenuhnya rasional karena adanya keterbatasan kognitif (kemampuan untuk memproses informasi), keterbatasan waktu, dan keterbatasan informasi. Keterbatasan ini membuat individu cenderung memilih solusi yang "cukup baik" (*satisficing*) daripada mencari solusi yang paling optimal (Simon, 1960). Individu akan menghadapi masalah dalam pengambilan keputusan karena adanya keterbatasan waktu dan sumber daya. Kondisi ini sering disebut dengan istilah *bounded rationality* (rasionalitas terbatas) (Kreitner & Kinicki, 2004).

Giarlotta dan Petralia (2024) menyatakan bahwa *bounded rationality* dipandang sebagai kondisi di mana pelaku mengambil keputusan dengan keterbatasan kapasitas komputasi, informasi, dan waktu sehingga sering memakai strategi "cukup baik" (*satisficing*) bukan optimasi sempurna. Vargas, et al., (2023) menjelaskan konsep *bounded rationality* menekankan keterbatasan komputasional dan karakteristik lingkungan (dua bilah gunting) manusia menggunakan heuristik adaptif karena tidak mampu melaksanakan pengambilan keputusan rasional sempurna. Selanjutnya Sharma, et al., (2025) menyatakan *bounded rationality* didefinisikan sebagai kondisi di mana bias perilaku dan *heuristik* muncul akibat keterbatasan kapasitas informasi dan komputasi dalam kajian keuangan, perilaku, dan pengambilan keputusan. Ini

adalah konsep inti yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan yang menyimpang dari model rasionalitas ekonomi klasik.

Teori rasionalitas terbatas menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat melihat semua kemungkinan alternatif keputusan dan konsekuensinya secara menyeluruh, dan seseorang tidak memiliki kapasitas komputasional untuk menentukan suatu hasil yang optimal bahkan bila ia memiliki informasi mengenai hal ini. Oleh karenanya, kapasitas manusia untuk perilaku rasional sangatlah terbatas dalam banyak dimensi (Jordao, et al., 2020).

Rasionalitas adalah kriteria yang digunakan dalam keputusan yang secara teoretis didasarkan pada praanggapan bahwa para pengambil keputusan tersebut memang rasional. Dengan kata lain, para pengambil keputusan menghargai rasionalitas sebagai kriteria pilihan dan dalam pengertian ini, dan melalui rute ini, rasionalitas dianggap sebagai prinsip penjelasan. Rasionalitas didefinisikan oleh Simon (1960) sebagai hubungan kesesuaian (efikasi) antara tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan cara untuk mencapainya (Simon, 1960). Rasionalitas terbatas memainkan peran penting dalam membentuk kualitas keputusan dengan mempertimbangkan sumber daya yang terbatas seperti: waktu, informasi, dan kemampuan kognitif. Kesimpulan ini menekankan pentingnya kesadaran dan tindakan pencegahan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Pratiwi & Wening, 2024). Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh sumber daya kognitif dan batasan waktu; agen bersikap *boundedly rational* sehingga

menghadirkan pola perilaku seperti aversi risiko saat keuntungan dan kecenderungan berbeda saat kerugian (Xu, et all., 2024).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep *bounded rationality* merupakan proses yang tidak sepenuhnya rasional, karena individu menghadapi keterbatasan dalam kapasitas kognitif, ketersediaan dan kualitas informasi, serta keterbatasan waktu.

2. Ciri-Ciri *Bounded Rationality*

Bounded rationality atau rasionalitas terbatas memiliki beberapa ciri utama yang membedakan proses pengambilan keputusan manusia dari rasionalitas sempurna. Berikut ciri-ciri *bounded rationality* (Simon, 1960):

a. Keterbatasan Kognitif (*Cognitive Limitations*)

Individu memiliki kemampuan terbatas dalam memproses informasi. Individu tidak dapat memahami, mengingat, dan menganalisis semua informasi yang tersedia secara menyeluruh.

b. Keterbatasan Informasi (*Limited Information*)

Pengambil keputusan tidak memiliki akses penuh terhadap semua informasi yang relevan. Informasi yang dimiliki sering kali tidak lengkap, tidak pasti, atau bahkan bias.

c. Keterbatasan Waktu (*Time Constraints*)

Keputusan sering harus diambil dalam waktu yang terbatas, sehingga individu tidak memiliki kesempatan untuk mengevaluasi seluruh alternatif yang mungkin.

d. *Satisficing* daripada *Optimizing*

Karena keterbatasan tersebut, individu tidak mencari keputusan yang paling optimal (*optimal decision*), melainkan keputusan yang cukup memuaskan atau “baik saja” (*satisficing decision*).

e. Penggunaan Heuristik (*Heuristic Decision-Making*)

Untuk mengatasi keterbatasan, individu menggunakan aturan sederhana, intuisi, atau pengalaman masa lalu sebagai panduan dalam mengambil keputusan, bukan melalui analisis logis yang mendalam.

f. Rasionalitas Kontekstual (*Contextual Rationality*)

Rasionalitas seseorang bergantung pada konteks lingkungan, pengalaman, dan sumber daya yang dimilikinya bukan pada standar rasionalitas universal.

3. Aspek *Bounded Rationality*

Simon (1960) membuat gagasan *bounded rationality* sebagai kritik terhadap teori rasionalitas sempurna. Teori ini mengakui bahwa otak manusia tidak sempurna dan lingkungan pengambilan keputusan sangat kompleks. Prinsip-prinsip utama *bounded rationality* meliputi :

- a. *Satisficing*: kecenderungan individu mencari solusi yang dianggap cukup baik dan memadai tanpa harus menelusuri seluruh alternatif yang ada, seperti mengambil keputusan berdasarkan pengalaman sebelumnya yang dirasa sudah cukup berhasil meskipun belum tentu paling optimal.

- b. *Heuristics*: penggunaan aturan praktis atau jalan pintas mental dalam pengambilan keputusan, seperti mengandalkan intuisi, kebiasaan kerja, atau arahan atasan ketika menghadapi situasi yang mendesak.
- c. Adaptasi: kemampuan individu menyesuaikan strategi pengambilan keputusan dengan kondisi lingkungan dan keterbatasan yang ada, seperti menyesuaikan keputusan dengan situasi lapangan, ketersediaan sumber daya, dan tekanan waktu (Simon, 1960).

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Bounded Rationality*

Konsep *bounded rationality* yang dikemukakan oleh Herbert A. Simon (1960) menjelaskan bahwa rasionalitas manusia dalam pengambilan keputusan dibatasi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor utama yang memengaruhi *bounded rationality* antara lain:

a. Keterbatasan Kapasitas Kognitif

Individu memiliki keterbatasan dalam kemampuan berpikir, memori, dan pemrosesan informasi. Kompleksitas masalah yang tinggi sering kali melampaui kapasitas kognitif manusia, sehingga individu tidak mampu mengevaluasi seluruh alternatif dan konsekuensinya secara menyeluruh (Simon, 1960).

b. Keterbatasan Informasi

Informasi yang tersedia bagi pengambil keputusan sering kali tidak lengkap, tidak sempurna, atau mengandung ketidakpastian. Keterbatasan ini membatasi kemampuan individu dalam memahami kondisi masalah dan memprediksi hasil dari setiap alternatif keputusan (Simon, 1960).

c. Keterbatasan Waktu

Tekanan waktu menyebabkan individu harus mengambil keputusan dengan cepat tanpa analisis mendalam. Kondisi ini mendorong penggunaan strategi penyederhanaan dan aturan praktis (*heuristics*) dalam pengambilan keputusan (Simon, 1960).

d. Penggunaan Heuristik dan Bias Kognitif

Untuk mengatasi keterbatasan kognitif dan informasi, individu menggunakan heuristik atau aturan sederhana dalam mengambil keputusan. Namun, penggunaan heuristik dapat menimbulkan bias kognitif yang menyebabkan penyimpangan dari rasionalitas normatif (Kahneman, 2003).

e. Nilai, Preferensi, dan Tujuan Individu

Keputusan dipengaruhi oleh sistem nilai, tujuan, dan preferensi subjektif individu. Faktor-faktor ini membentuk cara individu menilai alternatif dan menentukan pilihan yang dianggap memuaskan (Simon, 1960).

f. Konteks dan Lingkungan Organisasi

Dalam konteks organisasi, struktur, aturan, budaya, dan sistem informasi memengaruhi pilihan yang tersedia bagi pengambil keputusan. Lingkungan organisasi dapat mempersempit atau mengarahkan proses pengambilan keputusan sehingga memperkuat kondisi *bounded rationality* (March & Simon, 1993).

g. Ketidakpastian dan Kompleksitas Lingkungan

Lingkungan yang dinamis dan kompleks meningkatkan tingkat ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Semakin tinggi ketidakpastian, semakin besar keterbatasan rasionalitas yang dihadapi individu (Kahneman & Tversky, 1979).

D. Risk Perception

1. Pengertian Risk Perception

Risk Perception adalah proses kognitif dalam menafsirkan dan memahami informasi yang berkaitan dengan potensi bahaya atau bahaya. Menurut Kahneman dan Tversky (1979) dalam *Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk*, *Risk Perception* atau persepsi risiko didefinisikan sebagai cara individu menilai dan menafsirkan risiko berdasarkan persepsi subjektif terhadap kemungkinan kerugian dan keuntungan, bukan semata-mata berdasarkan nilai objektif atau probabilitas statistik.

Individu tidak selalu bertindak rasional dalam menghadapi risiko. Individu cenderung menilai risiko secara subyektif sesuai dengan persepsi, pengalaman, dan emosi mereka terhadap potensi kerugian dan keuntungan. Dalam kerangka *Prospect Theory*, individu lebih sensitif terhadap kerugian dibandingkan keuntungan yang setara (*loss aversion*), sehingga persepsi risiko sering kali didorong oleh rasa takut akan kerugian daripada harapan akan keuntungan (Kahneman & Tversky, 1979).

Risk Perception merupakan penilaian subjektif individu terhadap kemungkinan dan dampak suatu ancaman atau bahaya, yang dipengaruhi oleh

konteks sosial, pengalaman pribadi, dan tingkat informasi yang dimiliki. persepsi risiko tidak hanya mencerminkan probabilitas statistik, tetapi juga menjadi sumber motivasi bagi individu untuk mematuhi tindakan perlindungan diri (Waterschoot, et all., 2024). *Risk Perception* merupakan penilaian subjektif individu terhadap kemungkinan terjadinya bahaya serta dampaknya, yang dibentuk oleh pengalaman, konteks sosial-ekonomi, dan informasi yang tersedia. Persepsi risiko berperan sebagai *motivational resource* dalam menentukan perilaku perlindungan diri dalam kondisi ancaman dan bahwa faktor-faktor sosial dan ekonomi turut memodulasi bagaimana individu menilai dan merespons risiko (Camprubi & Garau, 2024).

Risk Perception adalah penilaian subjektif yang dibuat orang tentang karakteristik, tingkat keparahan, dan cara menangani suatu risiko mencakup elemen emosional (mis. rasa takut/*outrage*) yang memperbesar respons terhadap risiko (Grima et al., 2021). *Risk Perception* adalah evaluasi subjektif yang dibentuk oleh nilai budaya dan karakteristik risiko; budaya memoderasi bagaimana atribut risiko (*voluntariness, controllability, dll.*) diinterpretasikan Chassang et all. (2024). *Risk Perception* adalah penilaian subjektif individu terhadap situasi berisiko, dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan psikologis, yang memengaruhi keputusan (Setiawan, et all., 2024).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Risk Perception* merupakan penilaian subjektif individu atau kelompok terhadap tingkat ancaman atau bahaya dari suatu situasi, yang dipengaruhi oleh faktor

psikologis, sosial, budaya, dan kognitif. Persepsi ini sering kali berbeda dari risiko objektif yang diukur secara ilmiah.

2. Aspek-Aspek *Risk Perception*

Kahneman dan Tversky (1979), mengemukakan *Prospect Theory*, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan dalam kondisi risiko dan ketidakpastian. Teori ini menjadi dasar pemahaman tentang *Risk Perception* (persepsi risiko), yakni bagaimana seseorang mempersepsikan, menilai, dan merespons risiko secara subyektif, bukan semata-mata berdasarkan perhitungan rasional atau probabilitas objektif. Berikut adalah aspek aspek teori *Risk Perception* (Kahneman & Tversky, 1979).

a. *Loss Aversion* (Keengganan terhadap Kerugian)

Kecenderungan individu lebih menghindari kerugian dibandingkan mengejar keuntungan, seperti memilih alternatif keputusan yang dianggap paling aman meskipun peluang keuntungan yang diperoleh lebih kecil.

b. *Self-Control* (Kontrol Diri)

kemampuan individu mengendalikan dorongan impulsif dalam pengambilan keputusan, seperti menahan diri untuk tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa dan mempertimbangkan dampak jangka panjang.

c. *Regret Aversion* (Keengganan terhadap Penyesalan)

Kecenderungan individu menghindari keputusan yang berpotensi menimbulkan penyesalan di kemudian hari, seperti memilih opsi yang

sudah biasa dilakukan daripada mencoba alternatif baru yang berisiko (Loomes & Sugden, 1982).

d. *Probability Weighting* (Pembobotan Probabilitas)

Kecenderungan individu dalam mempersepsikan probabilitas suatu kejadian secara tidak objektif, seperti melebihkan kemungkinan terjadinya risiko yang kecil atau meremehkan kemungkinan terjadinya risiko yang besar dalam pengambilan keputusan.

e. *Decision Framing* (Kerangka Keputusan)

Kecenderungan individu dalam mengambil keputusan yang dipengaruhi oleh cara informasi atau risiko disajikan, sehingga perbedaan penyajian suatu pilihan dapat menghasilkan keputusan yang berbeda meskipun substansi risikonya sama.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Risk Perception*

a. Faktor Kognitif dan Keterbatasan Rasionalitas

Risk Perception sangat dipengaruhi oleh cara individu memproses informasi secara kognitif. Individu tidak menilai risiko berdasarkan probabilitas objektif, melainkan melalui pembobotan subjektif terhadap kemungkinan terjadinya suatu peristiwa (*probability weighting*). Selain itu, adanya *loss aversion* menyebabkan individu lebih sensitif terhadap potensi kerugian dibandingkan keuntungan yang setara, sehingga risiko sering kali dipersepsikan lebih besar dari kenyataan (Kahneman & Tversky, 1979).

b. Faktor Emosional dan Afektif

Emosi memainkan peran penting dalam membentuk persepsi risiko. Individu cenderung menggunakan *affect heuristic*. Risiko yang memicu rasa takut, cemas, atau ketidaknyamanan emosional akan dipersepsikan lebih tinggi, meskipun secara statistik tingkat bahayanya rendah (Waterschoot, et al., 2024).

c. Pengalaman dan Pengetahuan Individu

Pengetahuan dan pengalaman langsung berinteraksi dengan faktor sosial-ekonomi dalam membentuk persepsi risiko. Dengan demikian, persepsi risiko merupakan hasil dari pembelajaran individu terhadap lingkungan dan pengalaman masa lalu (Röpcke, et al., 2024).

d. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya turut membentuk cara individu mempersepsikan risiko. Norma sosial, nilai budaya, serta pengaruh kelompok referensi dapat memperkuat atau melemahkan persepsi risiko seseorang. Individu cenderung menyesuaikan persepsi risikonya dengan pandangan yang dominan dalam lingkungan sosialnya. Persepsi risiko bersifat kolektif dan dipengaruhi oleh dinamika sosial serta narasi yang berkembang di masyarakat (Camprubi & Garau, 2024).

e. Faktor Kontekstual dan Situasional

Kondisi lingkungan dan situasi tertentu turut memengaruhi persepsi risiko. Situasi krisis, ketidakpastian tinggi, atau keterbatasan waktu dapat meningkatkan sensitivitas individu terhadap risiko. Persepsi risiko

berfungsi sebagai dasar utama dalam menentukan perilaku adaptif dan strategi pengambilan keputusan (Waterschoot et al., 2024).

E. Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai pengambilan keputusan telah banyak dilakukan dengan meninjau berbagai faktor kognitif dan psikologis yang memengaruhi individu dalam menentukan suatu tindakan. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desiana et al. (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Rasionalitas Terbatas (*Bounded Rationality*) terhadap Pengambilan Keputusan” menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian adalah pegawai di perusahaan swasta sebanyak 120 orang, dengan sampel 80 responden yang diambil secara *purposive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan individu dalam memproses informasi, waktu, dan kapasitas kognitif berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan. Penelitian ini menegaskan bahwa individu tidak selalu mampu bersikap rasional secara optimal, terutama dalam kondisi yang kompleks dan menuntut keputusan cepat.
2. Karyadi et al. (2024) melalui penelitian “Evaluasi Penerapan Teori *Bounded Rationality* dalam Proses Pengambilan Keputusan Manajerial” menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan populasi manajer menengah di perusahaan manufaktur dan sampel 15 manajer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer cenderung menyederhanakan informasi sebagai strategi adaptif menghadapi kompleksitas lingkungan

kerja, meskipun strategi ini dapat menurunkan efektivitas keputusan bila informasi terlalu terbatas.

3. Agusta dan Yanti (2022) dalam penelitian “Pengaruh *Risk Perception* dan Herding terhadap Pengambilan Keputusan Investasi” menggunakan metode kuantitatif korelasional. Populasinya adalah investor individu di pasar saham Indonesia sebanyak 200 orang, dengan sampel 150 investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi, dan perilaku herding mendorong individu mengikuti keputusan mayoritas dalam kondisi ketidakpastian.
4. Irowati (2021) dalam penelitian “Pengaruh *Risk Perception*, *Regret Aversion*, *Bias Perception*, dan *Overconfidence* terhadap Pengambilan Keputusan Investasi” menggunakan metode kuantitatif survei dengan populasi investor pemula di pasar modal sebanyak 100 orang, dengan sampel 80 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis dan bias kognitif memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan individu, menegaskan bahwa pengambilan keputusan tidak hanya bersandar pada pertimbangan rasional.
5. Putra dan Widyastuti (2022) dalam penelitian “Pengaruh Faktor Kognitif dan Emosional terhadap Pengambilan Keputusan dalam Kondisi Ketidakpastian” menggunakan metode *mixed-method* dengan populasi pegawai perbankan sebanyak 150 orang, dan sampel 100 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan informasi mendorong individu

mengandalkan pengalaman dan intuisi, sehingga keputusan yang dihasilkan belum tentu optimal.

6. Rahmawati dan Nugroho (2023) dalam penelitian “Pengaruh Persepsi Risiko dan Tekanan Situasional terhadap Pengambilan Keputusan Individu” menggunakan metode kuantitatif korelasional dengan populasi pegawai BUMN sebanyak 120 orang, dan sampel 90 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan situasional, individu semakin mengandalkan strategi sederhana, mencerminkan *bounded rationality* dalam pengambilan keputusan.
7. Sari dan Prasetyo (2021) dalam penelitian “Pengaruh Keterbatasan Informasi terhadap Kualitas Pengambilan Keputusan” menggunakan metode kuantitatif survei dengan populasi karyawan di perusahaan logistik sebanyak 100 orang, sampel 75 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan informasi menjadi faktor utama yang menghambat individu mengevaluasi seluruh alternatif secara menyeluruh.
8. Wibowo dan Lestari (2022) dalam penelitian “Pengaruh Lingkungan Organisasi dan Budaya Kerja terhadap Pengambilan Keputusan” menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan populasi pegawai kantor pemerintahan sebanyak 50 orang, sampel 15 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi yang kaku dan budaya kerja membatasi fleksibilitas individu dalam mempertimbangkan alternatif keputusan.

9. Hidayat dan Putri (2024) dalam penelitian “Persepsi Risiko dan Pengambilan Keputusan Operasional Pada Aparat Penegak Hukum” menggunakan metode kuantitatif survei dengan populasi anggota organisasi profesi sebanyak 100 orang, sampel 80 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dengan persepsi risiko tinggi cenderung memilih keputusan yang lebih aman, meskipun tidak selalu efektif
10. Kurniawan dan Sulastri (2021) dalam penelitian “*Bounded Rationality* sebagai Faktor Penentu dalam Pengambilan Keputusan Organisasi” menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan populasi pegawai organisasi publik sebanyak 40 orang, sampel 15 orang. Hasil penelitian menegaskan bahwa *bounded rationality* merupakan realitas psikologis yang memengaruhi pengambilan keputusan individu, terutama pada organisasi dengan kompleksitas dan tekanan kerja tinggi.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa temuan penting mengenai pengambilan keputusan, *bounded rationality*, dan *risk perception*. Beberapa penelitian menekankan pengaruh *bounded rationality* terhadap pengambilan keputusan (Desiana et al., 2025; Karyadi et al., 2024; Kurniawan & Sulastri, 2021), sementara penelitian lain menyoroti peran *risk perception* dan bias psikologis seperti *regret aversion*, *overconfidence*, dan *herding* (Agusta & Yanti, 2022; Irowati, 2021; Anwar & Putri, 2024). Penelitian tambahan menunjukkan pengaruh keterbatasan informasi, tekanan situasional, dan budaya organisasi terhadap kualitas pengambilan keputusan (Sari & Prasetyo, 2021;

Wibowo & Lestari, 2022; Rahmawati & Nugroho, 2023; Putra & Widyastuti, 2022).

Kelebihan penelitian sebelumnya memberikan pemahaman teoritis yang mendalam mengenai *bounded rationality* dan persepsi risiko dalam pengambilan Keputusan, menggunakan berbagai metode penelitian (kuantitatif survei, korelasional, *mixed-method*, dan studi kasus kualitatif), sehingga memberikan perspektif yang beragam. Menyasar populasi dan sampel yang relevan di sektor organisasi, investasi, manajerial, dan sektor publik, sehingga memperlihatkan pengaruh psikologis dalam berbagai konteks keputusan.

Berdasarkan analisis penelitian sebelumnya, terdapat beberapa gap yang dapat diidentifikasi yaitu konteks penelitian masih terbatas pada organisasi swasta, perbankan, pasar modal, dan organisasi publik secara umum, sementara studi pada anggota Polri, khususnya Pama, masih sangat terbatas. Padahal, pengambilan keputusan di institusi kepolisian menghadapi risiko tinggi dan kondisi darurat yang unik. Penelitian sebelumnya sebagian besar fokus pada faktor individual seperti *bounded rationality* atau *risk perception*, namun belum mengintegrasikan secara komprehensif faktor situasional (tekanan kerja, keterbatasan informasi saksi, budaya organisasi) yang ada di lapangan, yang bisa mempengaruhi *bounded rationality* dalam konteks operasional kepolisian. Kurangnya penelitian yang mengaitkan teori *bounded rationality* dengan praktik nyata di lapangan, seperti olah TKP dan pengambilan keputusan cepat di lingkungan kerja berisiko tinggi.

Penelitian ini memiliki beberapa aspek yang membedakannya dari penelitian sebelumnya yaitu konteks spesifik pada Pama Polda Jawa Timur,

sehingga memberikan perspektif empiris unik tentang pengambilan keputusan di lingkungan kepolisian yang penuh tekanan dan risiko tinggi. Integrasi antara *bounded rationality* dan *risk perception* dengan faktor situasional lapangan, seperti keterbatasan informasi saksi, tekanan atasan, dan budaya organisasi, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih realistis dan holistik tentang pengambilan keputusan. Memberikan kontribusi praktis langsung bagi institusi kepolisian dan anggota Pama dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui pemahaman psikologis, adaptasi strategi, dan manajemen risiko, yang sebelumnya belum banyak diteliti. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi literatur akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang jelas bagi organisasi kepolisian dan profesionalisme anggota Pama dalam situasi operasional yang kompleks.

F. Hubungan Antara *Bounded Rationality*, *Risk Perception* dengan Pengambilan Keputusan Pada Pama

Pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam tugas perwira pertama (Pama) di Polda Jawa Timur, karena mereka sering dihadapkan pada situasi operasional yang kompleks, penuh tekanan, dan berisiko tinggi. Pama bertanggung jawab atas koordinasi anggota, pengaturan sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan pimpinan di lapangan, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat berdampak langsung terhadap kinerja satuan maupun keselamatan anggota dan masyarakat (Sutrisno, 2018). Dalam praktiknya, Pama sering menghadapi keterbatasan informasi, waktu, dan pengalaman yang membuat proses pengambilan keputusan menjadi sulit dan tidak selalu optimal. Kondisi ini

mencerminkan bahwa dalam konteks nyata, pengambilan keputusan yang dilakukan Pama tidak pernah sepenuhnya rasional, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor kognitif dan situasional.

Fenomena ini kemudian dapat dijelaskan melalui konsep *bounded rationality* yang diperkenalkan oleh Simon (1960). *Bounded rationality* menyatakan bahwa individu memiliki keterbatasan kognitif dalam memproses informasi dan mengevaluasi alternatif keputusan. Dalam konteks Pama, keterbatasan ini muncul karena harus membuat keputusan cepat dengan informasi yang tidak selalu lengkap, sehingga cenderung memilih alternatif yang dianggap cukup memuaskan atau "*satisficing*". Keputusan yang diambil Pama dalam kondisi rasionalitas terbatas ini sering kali mengandalkan pengalaman, intuisi, dan prioritas berdasarkan konteks mendesak di lapangan.

Selain itu, keterbatasan rasionalitas ini berkaitan erat dengan persepsi risiko (*risk perception*) yang dimiliki Pama. Dalam kondisi *bounded rationality*, informasi risiko yang kompleks biasanya disederhanakan melalui heuristik atau intuisi, sehingga persepsi risiko menjadi subjektif dan tidak selalu mencerminkan risiko objektif. Kahneman dan Tversky (1979) melalui *Prospect Theory*, menjelaskan bahwa individu menilai risiko berdasarkan potensi keuntungan dan kerugian relatif terhadap titik acuan tertentu, bukan berdasarkan nilai akhir keputusan. Fenomena seperti *loss aversion* dan pembobotan subjektif terhadap probabilitas menunjukkan bahwa keterbatasan kognitif berkontribusi langsung terhadap pembentukan persepsi risiko yang bias. Dalam konteks Pama, hal ini berarti keputusan operasional di lapangan dipengaruhi oleh bagaimana mereka memandang risiko,

sehingga keputusan yang diambil tidak selalu optimal meski bertujuan menjaga keselamatan dan efektivitas tugas.

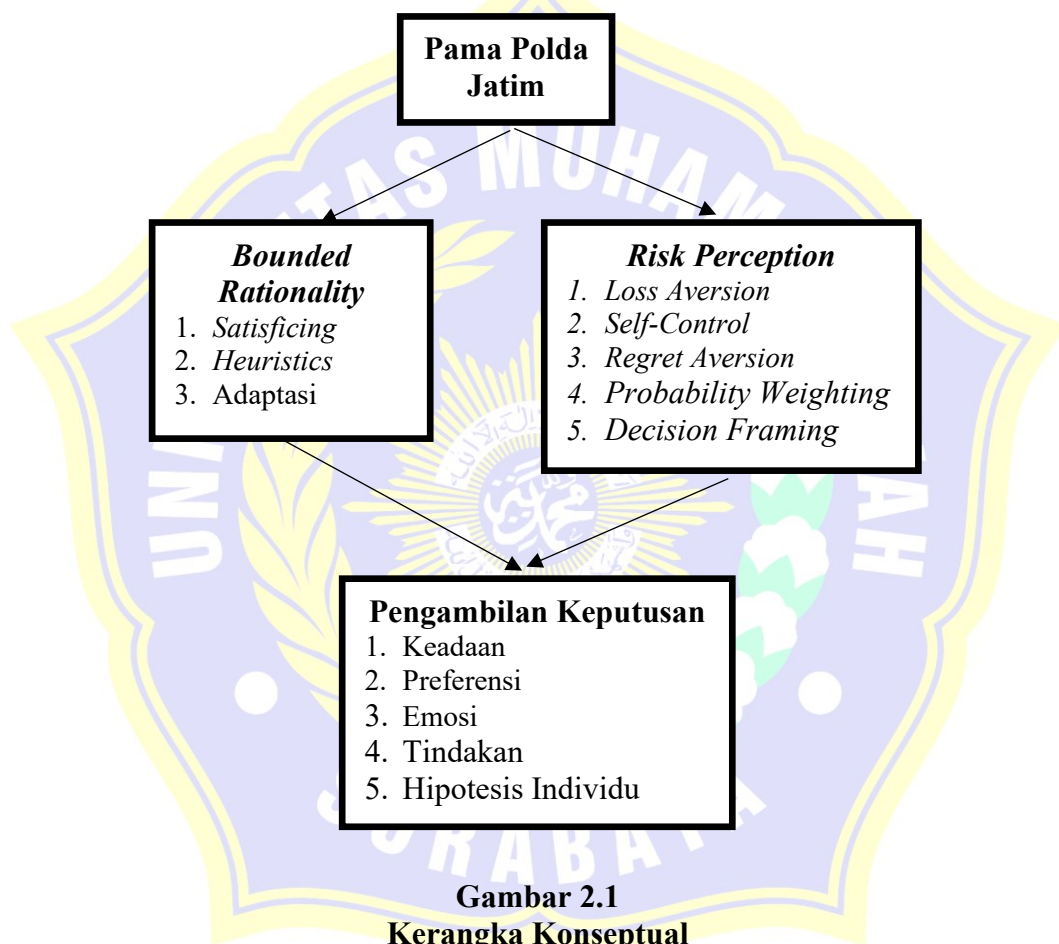
Hubungan antara *bounded rationality* dan *risk perception* selanjutnya berimplikasi pada kualitas dan arah pengambilan keputusan. Individu dengan tingkat rasionalitas terbatas yang tinggi cenderung memiliki persepsi risiko yang lebih dipengaruhi oleh emosi, pengalaman, dan cara informasi disajikan (*framing effect*). Persepsi risiko yang berlebihan dapat mendorong perilaku pengambilan keputusan yang terlalu berhati-hati (*risk averse*), sementara persepsi risiko yang rendah dapat memicu pengambilan keputusan yang berisiko (*risk seeking*). Dengan demikian, persepsi risiko berperan sebagai mekanisme mediasi yang menjelaskan bagaimana keterbatasan rasionalitas memengaruhi keputusan yang diambil.

Persepsi risiko menjadi faktor kunci dalam menjembatani keterbatasan kognitif dan perilaku keputusan. Persepsi risiko berfungsi sebagai sumber motivasi utama dalam menentukan respons individu terhadap situasi berisiko, khususnya dalam kondisi ketidakpastian tinggi (Waterschoot, et al., 2024). Persepsi risiko dibentuk oleh interaksi antara faktor kognitif, pengalaman, dan konteks sosial, yang semuanya merupakan karakteristik utama dari *bounded rationality*. Keterbatasan rasionalitas tidak hanya memengaruhi proses pengolahan informasi, tetapi juga membentuk cara individu menilai dan merespons risiko (Röpcke, et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat dan saling memengaruhi antara *bounded rationality*, *risk perception*, dan pengambilan keputusan. *Bounded rationality* membatasi kemampuan individu dalam memproses informasi secara optimal, yang pada gilirannya membentuk

persepsi risiko yang subjektif. Persepsi risiko tersebut kemudian memengaruhi arah dan kualitas pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini *bounded rationality* dan *risk perception* dipandang sebagai variabel penting yang secara simultan berkontribusi terhadap variasi perilaku pengambilan keputusan individu.

G. Kerangka Konseptual



H. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang diajukan peneliti untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih, yang kemudian diuji melalui penelitian empiris (Kerlinger, 2000). Hipotesis berfungsi sebagai panduan bagi

penelitian dalam mengarahkan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil penelitian. Dengan kata lain, hipotesis adalah dugaan atau prediksi yang bersifat sementara mengenai hubungan antara variabel yang diteliti, yang dapat diterima atau ditolak berdasarkan bukti empiris.

Dalam penelitian ini, hipotesis difokuskan pada hubungan antara *Bounded Rationality*, *Risk Perception*, dan Pengambilan Keputusan pada Pama Poldo Jawa Timur. Hipotesis ini disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan, sehingga setiap hipotesis mencerminkan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab secara empiris. Berdasarkan definisi dan rumusan masalah tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H₁: Ada hubungan antara *Bounded Rationality* dengan Pengambilan Keputusan pada Pama Poldo Jawa Timur.
- H₂: Ada hubungan antara *Risk Perception* dengan Pengambilan Keputusan pada Pama Poldo Jawa Timur.
- H₃: Ada hubungan antara *Bounded Rationality* dan *Risk Perception* dengan Pengambilan Keputusan pada Pama Poldo Jawa Timur.